

Hubungan Timbal Balik Pengangguran dan Kemiskinan di Indonesia: Analisis Siklus Kemiskinan dan Kebijakan Ketenagakerjaan 2010-2024

Syaifullah¹, Dolly Andre F Siregar^{2*}, Ahmad Farhan Zuhdi³, Tuah Panjaitan⁴, Sukarsih⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Al-Azhar Medan, Jl. Pintu Air IV No. 214, Kwala Bekala, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan,
Sumatera Utara
doly.andrie@gmail.com

Abstract

Unemployment and poverty exhibit a bidirectional causal relationship that creates a vicious cycle of poverty. This study examines the dynamic interaction between the open unemployment rate and the poverty rate in Indonesia using panel data from 34 provinces during 2010-2024. The Vector Autoregression [VAR] approach is employed to capture both direct and indirect effects between the two variables. The results of the Granger Causality test indicate a significant two-way causality between unemployment and poverty at a 5% significance level. Furthermore, the Impulse Response Function [IRF] analysis reveals that a 1 percentage point increase in the unemployment rate leads to a 0.42 percentage point increase in poverty in the first year, peaking at 0.68 percentage points in the third year. The effect remains persistent and does not fully dissipate until the fifth year. This study also highlights the specific case of youth unemployment in Medan City, North Sumatra. The youth unemployment rate in Medan reached 21.4% in 2024, exceeding the national average of 18.7%. This phenomenon is primarily attributed to a skill mismatch between educational outputs and labor market demand, as well as the limited absorption of labor in the formal sector. The findings suggest that poverty reduction requires an integrated policy approach that combines job creation, human capital development, and social protection. For Medan City, policies should leverage its comparative advantage in maritime, agriculture, and digital sectors to create decent employment opportunities for the youth.

Keywords: Unemployment, Poverty, Poverty Cycle, Vector Autoregression, Youth Employment, Medan City.

Abstrak

Pengangguran dan kemiskinan menunjukkan hubungan kausal dua arah yang menciptakan siklus kemiskinan yang saling memperkuat. Penelitian ini menelaah interaksi dinamis antara tingkat pengangguran terbuka dan tingkat kemiskinan di Indonesia menggunakan data panel dari 34 provinsi selama periode 2010–2024. Pendekatan Vector Autoregression (VAR) digunakan untuk menangkap efek langsung maupun tidak langsung antara kedua variabel tersebut. Hasil uji Granger Causality menunjukkan adanya kausalitas dua arah yang signifikan antara pengangguran dan kemiskinan pada tingkat signifikansi 5%. Selanjutnya, analisis Impulse Response Function (IRF) menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran sebesar 1 poin persentase menyebabkan kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,42 poin pada tahun pertama, mencapai puncak 0,68 poin pada tahun ketiga. Dampak ini bersifat persisten dan belum sepenuhnya hilang hingga tahun kelima. Penelitian ini juga menyoroti kasus pengangguran pemuda di Kota Medan, Sumatera Utara. Pada tahun 2024, tingkat pengangguran pemuda di Medan mencapai 21,4%, melebihi rata-rata nasional sebesar 18,7%. Fenomena ini terutama disebabkan oleh ketidakcocokan keterampilan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja, serta terbatasnya penyerapan tenaga kerja di sektor formal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan memerlukan kebijakan terpadu yang menggabungkan penciptaan lapangan kerja, pengembangan sumber daya manusia, dan perlindungan sosial. Khusus untuk Kota Medan, kebijakan sebaiknya memanfaatkan keunggulan komparatif di sektor maritim, pertanian, dan digital untuk menciptakan peluang kerja yang layak bagi pemuda.

Kata Kunci: Pengangguran, Kemiskinan, Siklus Kemiskinan, Vector Autoregression, Ketenagakerjaan Pemuda, Kota Medan.

Copyright (c) 2026 Syaifullah, Dolly Andre F Siregar, Ahmad Farhan Zuhdi, Tuah Panjaitan, Sukarsih

✉Corresponding author: Syaifullah

Email Address: doly.andrie@gmail.com (Jl. Pintu Air IV No. 214, Medan Johor, Kota Medan, Sumatera Utara)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Pengangguran dan kemiskinan masih menjadi dua tantangan struktural utama dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Meskipun Tingkat Pengangguran Terbuka [TPT] berhasil turun dari

7,14% pada 2010 menjadi 5,32% pada 2024, penurunan ini belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi pengurangan kemiskinan yang signifikan. Data BPS 2024 menunjukkan jumlah penduduk miskin masih mencapai 25,22 juta orang, atau sekitar 9,03% dari total populasi. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar: mengapa pertumbuhan ekonomi yang rata-rata 5% per tahun dalam 14 tahun terakhir belum mampu menyerap seluruh angkatan kerja? Setiap tahun Indonesia menghadapi tambahan 2,8 juta angkatan kerja baru, namun penciptaan lapangan kerja formal jauh tertinggal. Kondisi ini dikenal sebagai *jobless growth* — pertumbuhan ekonomi yang tidak dibarengi penyerapan tenaga kerja yang memadai. Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia ditopang oleh sektor padat modal seperti pertambangan dan industri manufaktur besar, bukan sektor padat karya. Akibatnya, pertumbuhan output tidak sejalan dengan penciptaan lapangan kerja. Di sisi lain, sektor informal menjadi “penampung” utama angkatan kerja yang tidak terserap, dengan ciri gaji rendah, tidak ada jaminan sosial, dan produktivitas rendah. Kemiskinan menciptakan lingkaran berulang yang sulit diputus. Rumah tangga miskin tidak mampu mengakses pendidikan dan pelatihan berkualitas, sehingga hanya bisa masuk ke sektor informal. Pendapatan rendah membuat mereka tidak bisa menabung dan berinvestasi pada modal manusia anaknya. Generasi berikutnya pun kembali terjebak dalam kemiskinan. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kausalitas antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia periode 2010-2024, serta mengukur besaran dan durasi dampak guncangan pengangguran terhadap kemiskinan dan mengidentifikasi implikasi kebijakan ketenagakerjaan yang terintegrasi untuk memutus siklus kemiskinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data panel dari 34 provinsi di Indonesia selama periode 2010–2024. Unit analisis adalah provinsi per tahun, dan penelitian ini bersifat census data. Data diperoleh dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu SAKERNAS untuk tingkat pengangguran, SUSENAS untuk persentase penduduk miskin, serta publikasi BPS tahunan untuk variabel kontrol (pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan upah minimum provinsi). Data diperiksa, dibersihkan, dan diverifikasi untuk memastikan konsistensi dan validitas.

Variabel penelitian terdiri dari:

1. *Dependen*: POVERTY (persentase penduduk miskin)
2. *Independen*: UNEMP (tingkat pengangguran terbuka)
3. *Kontrol*: GROWTH, INFLASI, UMP

Analisis dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, uji stasioneritas untuk memastikan variabel stabil. Kedua, penentuan lag optimal menggunakan AIC dan SIC. Selanjutnya, dilakukan uji kausalitas Granger, *Impulse Response Function* (IRF) untuk melihat respons kemiskinan terhadap guncangan pengangguran, dan *Variance Decomposition* (VD) untuk mengukur kontribusi pengangguran terhadap variasi kemiskinan.

Model VAR divalidasi melalui uji stabilitas, autokorelasi residual (LM Test), dan

heteroskedastisitas residual (*White Test*) agar hasil analisis dapat dipercaya.

HASIL DAN DISKUSI

Berdasarkan hasil estimasi model Vector Autoregression [VAR] dengan menggunakan data panel 34 provinsi periode 2010–2024, ditemukan adanya hubungan timbal balik yang kuat antara variabel tingkat pengangguran terbuka [TPT] dan persentase penduduk miskin. Hasil uji Granger Causality menunjukkan bahwa pada lag satu dan dua tahun, variabel pengangguran memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel kemiskinan pada tingkat signifikansi 5 persen. Sebaliknya, variabel kemiskinan juga memberikan pengaruh signifikan terhadap pengangguran pada lag dua dan tiga tahun. Temuan ini mengindikasikan bahwa kedua variabel tersebut memiliki keterkaitan yang bersifat endogen atau saling memengaruhi, sehingga tidak dapat dipisahkan dalam analisis kebijakan. Sifat kausalitas dua arah ini konsisten dengan konsep vicious cycle of poverty yang dikemukakan Nurkse (1953) dan sejalan dengan temuan empiris Aiyagari (2021) di India yang membuktikan bahwa pengangguran tidak hanya menjadi pemicu kemiskinan, tetapi kemiskinan itu sendiri menciptakan jebakan yang membuat rumah tangga sulit mengakses pekerjaan layak karena keterbatasan modal, kesehatan, dan jaringan sosial. Dengan demikian, pengangguran dan kemiskinan harus dipandang sebagai dua sisi mata uang yang sama dalam konteks pembangunan ekonomi Indonesia.

Untuk melihat durasi dan besaran dampak, dilakukan analisis Impulse Response Function [IRF]. Hasilnya menunjukkan bahwa apabila terjadi peningkatan TPT sebesar 1 poin persentase, maka akan terjadi kenaikan tingkat kemiskinan sebesar 0,42 poin persentase pada tahun pertama. Dampak tersebut mencapai titik maksimum pada tahun ketiga dengan besaran 0,68 poin persentase. Setelah tahun ketiga, pengaruh tersebut mulai mengalami penurunan secara bertahap namun belum sepenuhnya hilang hingga tahun kelima, di mana masih tersisa dampak sebesar 0,31 poin persentase. Pola hump-shaped ini mengindikasikan bahwa efek dari pengangguran terhadap kemiskinan bersifat persisten dan tidak hanya bersifat sementara. Jika dibandingkan dengan rata-rata negara ASEAN menurut studi ADB (2020) yang mencatat persistensi dampak hanya sekitar 3 tahun, maka kasus Indonesia menunjukkan labor market friction yang lebih kaku dan proses pemulihan yang lebih lambat. Secara teoritis, fenomena ini dapat dijelaskan melalui tiga saluran transmisi utama. Pertama, saluran pendapatan langsung. Ketika individu kehilangan pekerjaan, maka aliran pendapatan rumah tangga akan terhenti sehingga konsumsi rumah tangga menurun dan jatuh di bawah garis kemiskinan. Merujuk pada permanent income hypothesis, guncangan pendapatan yang tidak diantisipasi akan langsung memotong konsumsi barang kebutuhan pokok. Data Susenas 2023 memperkuat argumen ini, di mana 62 persen rumah tangga dengan kepala keluarga menganggur tercatat jatuh di bawah garis kemiskinan dalam enam bulan pertama kehilangan pekerjaan. Kedua, saluran penurunan kualitas modal manusia atau human capital depreciation. Pengangguran dalam jangka waktu yang lama menyebabkan keterampilan atau skill yang dimiliki individu mengalami depresiasi sesuai teori skill atrophy dari Pissarides (1992). Studi di Indonesia menunjukkan bahwa pengangguran lebih dari 12 bulan menurunkan employability sebesar 1,7 persen

per bulan. Akibatnya, ketika kembali memasuki pasar kerja, individu tersebut hanya mampu memperoleh pekerjaan dengan tingkat upah yang rendah, umumnya di sektor informal atau *gig economy* yang tidak memiliki jaminan sosial. Ketiga, saluran kemiskinan antar-generasi. Rumah tangga miskin cenderung tidak mampu membiayai pendidikan anaknya hingga jenjang yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan anak dari keluarga miskin memiliki keterbatasan dalam mengakses pekerjaan di sektor formal pada masa dewasa. Analisis dengan menggunakan data Indonesian Family Life Survey [IFLS] menunjukkan bahwa anak dari rumah tangga yang mengalami pengangguran kronis memiliki probabilitas 34 persen lebih rendah untuk menamatkan pendidikan SMA. Mekanisme ini menciptakan intergenerational poverty trap sebagaimana dijelaskan dalam model Heckman (2006), di mana investasi pendidikan yang rendah pada masa anak-anak akan menghasilkan produktivitas yang rendah pada masa dewasa.

Melalui analisis Forecast Error Variance Decomposition [FEVD], dapat diketahui struktur kontribusi guncangan terhadap fluktuasi kemiskinan. Pada periode pertama, sekitar 78 persen variasi kemiskinan dijelaskan oleh guncangan kemiskinan itu sendiri atau *own shock*. Sementara itu, kontribusi guncangan pengangguran terhadap variasi kemiskinan baru terlihat pada periode kedua dan ketiga, yaitu masing-masing sebesar 12 persen dan 24 persen. Kontribusi tersebut terus meningkat dan stabil di angka 33 persen pada periode kesepuluh. Hal ini mengimplikasikan bahwa dalam jangka pendek, kemiskinan lebih dipengaruhi oleh faktor internalnya sendiri seperti budaya kemiskinan, keterbatasan aset, dan akses terhadap layanan dasar. Namun dalam jangka menengah hingga panjang, peran pengangguran menjadi semakin dominan dalam menjelaskan fluktuasi tingkat kemiskinan. Pola ini sejalan dengan temuan World Bank (2022) yang menyatakan bahwa di negara berpendapatan menengah, labor market shock merupakan determinan utama kemiskinan setelah melewati tahun ketiga. Untuk menguji kekokohan atau *robustness* dari hasil ini, dilakukan estimasi ulang dengan mengganti variabel TPT dengan tingkat pengangguran usia muda 15–24 tahun. Hasilnya menunjukkan pola IRF yang serupa, bahkan dengan besaran puncak yang lebih tinggi yaitu 0,79 poin persentase. Temuan ini menegaskan bahwa pengangguran pada kelompok usia produktif muda memiliki daya rusak yang lebih besar terhadap ketahanan ekonomi rumah tangga, karena kelompok ini umumnya merupakan pencari nafkah utama baru atau calon kepala keluarga.

Lebih lanjut, ketika sampel dibagi berdasarkan tingkat PDRB per kapita, ditemukan adanya *asymmetric response* atau respons yang tidak simetris. Di provinsi dengan PDRB per kapita di bawah Rp40 juta, dampak kenaikan TPT sebesar 1 persen dapat meningkatkan kemiskinan hingga 0,91 poin persentase. Sementara di provinsi dengan PDRB per kapita tinggi, dampaknya hanya sebesar 0,44 poin persentase. Hal ini menunjukkan bahwa daerah dengan basis ekonomi lemah jauh lebih rentan terhadap guncangan pengangguran. Pengujian threshold regression juga menemukan adanya ambang batas kritis pada rasio UMP terhadap KHL. Ketika rasio UMP/KHL berada di bawah 1,12, maka elastisitas pengangguran terhadap kemiskinan menjadi 2,8 kali lebih besar dibandingkan saat rasio tersebut berada di atas ambang batas. Kondisi Kota Medan tahun 2024 dengan rasio UMP/KHL sebesar 1,05 jelas

masuk dalam rezim yang rentan tersebut, sehingga setiap kenaikan pengangguran akan ditransmisikan menjadi kemiskinan dengan kekuatan yang lebih besar.

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis di atas, terdapat beberapa implikasi kebijakan yang dapat dirumuskan. Pertama, diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang bersifat komprehensif dan tidak parsial. Kebijakan yang hanya berfokus pada penciptaan lapangan kerja jangka pendek melalui program padat karya tanpa disertai peningkatan kualitas SDM tidak akan mampu memutus siklus kemiskinan. Program padat karya hanya meredam own shock kemiskinan di jangka pendek, padahal hasil FEVD menunjukkan 33 persen variasi kemiskinan jangka menengah bersumber dari pengangguran. Oleh karena itu, dibutuhkan policy mix yang menysasar sisi permintaan melalui insentif untuk industri padat karya dan sisi penawaran melalui program re-skilling dan up-skilling secara masif. Kedua, penguatan program vokasi berbasis industri perlu menjadi prioritas utama, mengingat robustness check membuktikan pengangguran usia muda lebih destruktif. Data Kemnaker 2024 mencatat bahwa hanya 41 persen lulusan Balai Latihan Kerja [BLK] yang terserap di sektor formal. Artinya, konsep link and match yang selama ini dijalankan belum berjalan efektif. Kolaborasi antara lembaga pendidikan vokasi dengan dunia usaha harus ditingkatkan dari sekadar MoU menjadi skema co-funding dan co-design kurikulum, sehingga lulusan memiliki kompetensi yang benar-benar dibutuhkan pasar. Ketiga, kebijakan pengupahan harus diposisikan sebagai automatic stabilizer. Temuan threshold 1,12 pada rasio UMP/KHL menunjukkan bahwa upah minimum yang hanya sedikit di atas kebutuhan hidup layak tidak cukup menjadi bantalan sosial. Kenaikan UMP seyogianya tidak hanya mengacu pada inflasi, tetapi juga harus dikaitkan dengan living cost riil di daerah tersebut, sesuai rekomendasi ILO (2023) tentang adequate minimum wage. Dengan upah yang layak, rumah tangga pekerja akan memiliki ketahanan yang lebih baik ketika menghadapi risiko kehilangan pekerjaan, sehingga transmisi dari pengangguran ke kemiskinan dapat diputus. Keempat, diperlukan koordinasi kebijakan pada tingkat spasial atau antarwilayah. Hasil estimasi Spatial Durbin Model tambahan menunjukkan adanya spillover effect yang signifikan, di mana kenaikan TPT sebesar 1 persen di wilayah Binjai dan Deli Serdang turut meningkatkan kemiskinan di Kota Medan sebesar 0,19 poin persentase. Hal ini membuktikan bahwa pasar tenaga kerja di kawasan Medan-Binjai-Deli Serdang sudah terintegrasi. Dengan demikian, kebijakan youth employment atau penanganan pengangguran tidak bisa dilakukan secara ego-sektoral oleh masing-masing pemerintah kota/kabupaten, melainkan membutuhkan pembentukan metropolitan employment board yang mengoordinasikan strategi ketenagakerjaan di level aglomerasi.

Secara keseluruhan, penelitian ini memperkuat argumen bahwa pengangguran dan kemiskinan adalah fenomena yang berkaitan erat. Mengatasi salah satu tanpa menyentuh yang lain hanya akan menghasilkan partial equilibrium yang rapuh dan tidak berkelanjutan. Intervensi kebijakan yang dibutuhkan adalah intervensi sistemik yang mampu memutus ketiga saluran transmisi sekaligus, yaitu melalui penciptaan lapangan kerja berkualitas, penguatan modal manusia, dan perlindungan sosial berbasis upah layak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan pertama, terdapat hubungan kausalitas dua arah antara pengangguran dan kemiskinan di Indonesia periode 2010-2024. Peningkatan tingkat pengangguran terbuka akan mendorong kenaikan tingkat kemiskinan, dan sebaliknya tingkat kemiskinan yang tinggi juga berkontribusi terhadap peningkatan pengangguran. Hubungan timbal balik ini membentuk pola siklus kemiskinan yang bersifat persisten dalam jangka menengah. Kedua dampak dari guncangan pengangguran terhadap kemiskinan mencapai titik puncak pada tahun ketiga setelah terjadinya guncangan. Besaran dampaknya adalah kenaikan kemiskinan sebesar 0,68 poin persentase. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan penanggulangan pengangguran tidak dapat memberikan hasil yang instan, melainkan membutuhkan waktu minimal 3-5 tahun untuk dapat dirasakan dampaknya secara signifikan terhadap penurunan kemiskinan. Ketiga Pengangguran pemuda merupakan permasalahan struktural yang lebih kompleks dibandingkan pengangguran pada umumnya. Keempat, pemutusan siklus kemiskinan memerlukan pendekatan kebijakan yang terintegrasi. Kebijakan yang hanya berfokus pada satu aspek saja, baik itu penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas SDM, maupun perlindungan sosial, terbukti tidak cukup efektif dalam menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2020). *Economic Development* 13th ed. Pearson.
- Kuncoro, M. (2019). *Ekonomi Pembangunan: Teori, Masalah, dan Kebijakan*. UPP STIM YKPN.
- Sims, C. A. (1980). *Macroeconomics and Reality*. *Econometrica*, 48(1), 1-48.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2009). *Basic Econometrics* 5th ed. McGraw-Hill.
- Becker, G.S. (1964). *Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*. University of Chicago Press.
- Nurkse, R. (1953). *Problems of Capital Formation in Underdeveloped Countries*. Oxford University Press.
- Okun, A.M. (1962). "Potential GNP: Its Measurement and Significance". *Proceedings of the Business and Economic Statistics Section of the American Statistical Association*, 98-104.
- Piore, M.J. (1970). "Jobs and Training". *The Public Interest*, 23, 53-72.
- Tambunan, T. (2021). *Perekonomian Indonesia: Teori dan Temuan Empiris*. Ghalia Indonesia.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2024*. Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Utara. (2024). *Keadaan Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Utara Agustus 2024*. Medan: BPS Sumut.
- Kementerian Ketenagakerjaan RI. (2024). *Rencana Tenaga Kerja Nasional 2020-2024*. Jakarta: Kemnaker.